



Pemkot Siap Cairkan Dana Kelurahan Tahap 2

YOGYA, TRIBUN - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasesa, menjelaskan serapan dana kelurahan tahap pertama telah di atas 50 persen. Hal ini membuat syarat pencairan dana kelurahan tahap kedua telah terpenuhi.

Dana kelurahan tahap pertama yang dicairkan pada tahun ini sejumlah Rp7,7 miliar yang didistribusikan ke 45 kelurahan dengan jumlah yang berbeda-beda. Tercatat hingga 18 Juli 2019, serapan dana kelurahan tahap pertama telah mencapai Rp 4,1 miliar atau 53 persen. "Sudah lebih dari 50 persen. Ada yang kurang dari 50 persen tapi semuanya saling melengkapi," ujarnya. Senin (29/7).

Ia menjelaskan, kendala dari serapan dana kelurahan tahap pertama tersebut

ada pada penganggaran fisik. Seluruh kelurahan diwajibkan memiliki anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan pekerjaan fisik menggunakan dana kelurahan, sementara untuk pekerjaan fisik kebanyakan baru dimulai setelah Lebaran. "Fisik banyak yang belum selesai, sementara yang non fisik sudah selesai," ujarnya.

Meski demikian, Wasesa mengatakan bahwa pencairan dana kelurahan tahap dua sudah memenuhi syarat, yakni serapan dana kelurahan tahap pertama harus melebihi 50 persen. "Tahap kedua kira-kira September. Sekarang sedang proses pencairan tahap kedua ke Kementerian Keuangan," bebernya.

Sebelumnya, Lurah Kotabaru Supardi mengatakan, total dana kelurahan yang diterima Kelurahan Kotabaru adalah Rp352 juta. Namun uang

tersebut seluruhnya berada di Pemerintah Kota Yogyakarta, tepatnya di Badan Perencanaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.

"Jadi untuk pencairan dana kelurahan ini, pihak kelurahan yang harus aktif. Setelah menyerahkan SPJ, maka dana kelurahan bisa dicairkan. Jadi sistemnya kami 'nalang' dulu. Tapi sejauh ini tidak ada kendala," ungkapnya.

Secara keseluruhan, dana kelurahan di Kotabaru aman digunakan sesuai peruntukan yakni untuk pemberdayaan masyarakat serta untuk pembangunan fisik. Ia mengatakan, untuk pembangunan fisik, yang paling mendesak adalah pembangunan jalan inspeksi di RT 1 dan RW 1 Kotabaru yang merupakan daerah kantong kemiskinan. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005